

## Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia\*

### *Allocative Role of Government through Procurement of Goods/Services and Its Impact on Indonesian Economy*

Azwar<sup>α β</sup>

<sup>α</sup> Email: azwar.iskandar@gmail.com

<sup>β</sup> Balai Diklat Keuangan Makassar  
Badan Pendidikan dan Pelatihan  
Keuangan  
Kementerian Keuangan  
Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar  
90234

#### Riwayat artikel:

- Diterima 20 Mei 2016
- Direvisi 25 Juli 2016
- Disetujui 1 Agustus 2016

**Kata kunci:** belanja pemerintah; pengadaan barang/jasa; VAR

**Klasifikasi JEL :** H410; H540; H570

#### Abstract

*This study aims to analyze the impact of the allocative role of government through procurement on the Indonesian economy which is represented by Gross Domestic Product and relationship between them. Using monthly data from Badan Pusat Statistik and Monev Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) year 2013-2014, this study is conducted by applying Vector Auto Regression (VAR) with test of Impulse Response Function (IRF) and Variance Decomposition (VD). The results of the study show that (i) shock or values change of the procurement of goods and services had a positive impact on Indonesian economy in long run, in which 91,12 % variation of the economy of Indonesia derived from procurement by government; (ii) Indonesian economy also has a positive impact on procurement but not permanently. Shock or changes of economy of Indonesia for a longer time will give negative impact on government procurement that continues to increase in the long run.*

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa terhadap perekonomian Indonesia yang diwakili oleh pertumbuhan ekonomi (PDB) dan hubungan timbal balik di antara keduanya. Dengan menggunakan pendekatan analisis model *Vector Autoregression* (VAR) melalui pengujian *Impulse Response Function* (IRF) dan *Variance Decomposition* (VD), secara empiris penelitian ini menemukan bahwa: (i) *shock* atau perubahan nilai realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Respon positif perekonomian ini berlangsung cepat dan terus berlangsung dalam jangka panjang secara permanen, di mana 91,12 % variasi pembentukan indikator perekonomian Indonesia (pada akhir periode penelitian), berasal dari sektor pengadaan barang/jasa pemerintah; (ii) sebaliknya, perekonomian Indonesia juga memberikan dampak positif terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, dampak positif ini hanya berlangsung sementara. *Shock* atau perubahan yang terjadi pada perekonomian dalam jangka waktu lebih lama akan memberikan dampak negatif terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Respon negatif ini terus berlangsung dengan tren yang terus meningkat dalam jangka panjang.

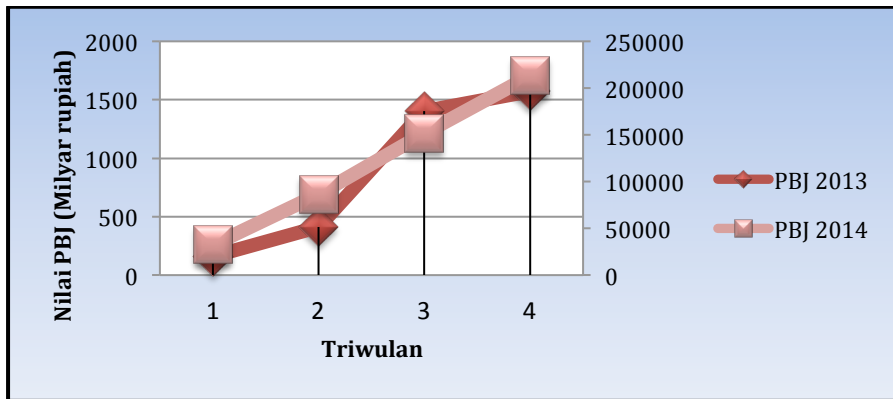
### 1. PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi makro, *government expenditure* (pengeluaran pemerintah) adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis untuk barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M). Secara matematis dapat dirumuskan:  $Y = C + I + G + (X-M)$  (Dumairy, 2006).

Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal (dengan salah satu penekanannya) melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Dari sini, pemerintah melalui kebijakannya dapat melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir sebagian besar belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBN dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, seperti belanja barang, belanja modal, sebagian belanja bantuan sosial dan belanja hibah. Belanja barang yang dialokasikan merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan barang/jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal/investasi dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal dialokasikan untuk mendukung pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

**GAMBAR-1. Realisasi PBJ Tahun 2013-2104 (miliar Rupiah)**



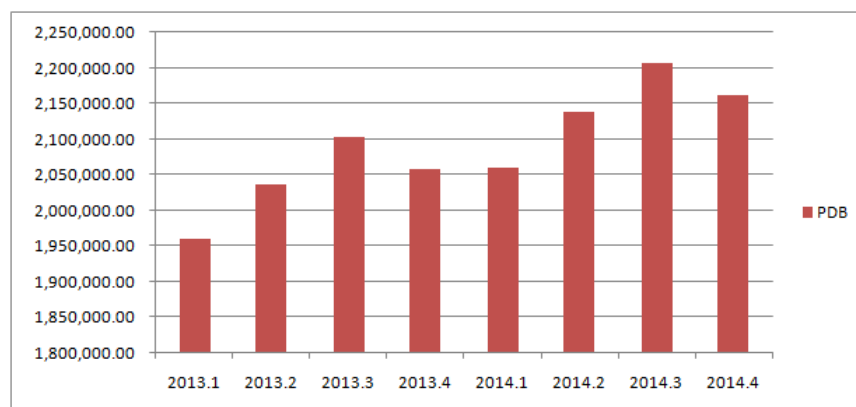
Sumber : Monev LKPP, 2015

Berdasarkan data pada GAMBAR-1, realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2013 hingga 2014 terus mengalami peningkatan. Pada triwulan IV tahun 2013, realisasi belanja pemerintah melalui pengadaan barang/jasa tercatat mencapai Rp 1,572 Tririlun. Selanjutnya, pada triwulan I dan IV tahun 2014, nilai realisasi mencapai jumlah yang sangat besar yaitu Rp32,35 triliun dan Rp213,13 triliun (Monev LKPP, 2015).

Sementara itu, dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia yang diukur melalui indikator PDB juga memperlihatkan tren yang terus meningkat. Dari GAMBAR-2 terlihat bahwa sejak periode triwulan I hingga triwulan berikutnya tahun 2013 PDB Indonesia terus mengalami peningkatan, hingga mencapai puncaknya pada triwulan III sebesar Rp2.103 triliun. Begitu pula di tahun 2014, PDB Indonesia memperlihatkan tren yang

meningkat sejak awal periode, hingga mencapai puncaknya di triwulan III sebesar Rp2.206 triliun (BPS, 2015).

#### GAMBAR-2. Produk Domestik Bruto Tahun 2013.1-2014.4 (miliar Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik (2015)

Dalam beberapa penelitian terdahulu<sup>‡</sup>, kebijakan belanja atau pengeluaran pemerintah terbukti secara empiris memiliki pengaruh atau dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun daerah. Begitu pula dalam model hubungan timbal balik, pertumbuhan ekonomi juga dapat memberikan dampak terhadap tingkat pengeluaran pemerintah. Namun sayangnya, beberapa penelitian terdahulu tersebut hanya melihat dan mengkaji pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) secara umum. Pengkajian terhadap pengeluaran pemerintah secara spesifik yang dilihat dari beberapa aspek secara khusus belum banyak dilakukan.

Sebagaimana yang diketahui, pengeluaran pemerintah dalam APBN adalah jumlah atau nominal yang terdiri dari beberapa rincian belanja, baik dilihat dari pembagian jenis fungsi dan belanja, maupun dari mekanisme pengalokasiannya. Pengeluaran pemerintah ada yang dibelanjakan dalam bentuk *cash* atau ada juga melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pelelangan umum atau seleksi sesuai peraturan yang berlaku. Kurangnya *resources* hasil penelitian pada konteks ini sesungguhnya adalah kekosongan dalam ranah ilmiah yang selayaknya diisi. Padahal, dengan melihat dan mengkaji tren atau perilaku pengeluaran pemerintah dari salah satu aspek secara spesifik, maka kebijakan pemerintah dalam ranah *spending review* dapat dirumuskan secara spesifik pula pada aspek yang dipandang memiliki peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti misalnya aspek pengadaan barang/jasa. Dengan perannya yang strategis dewasa ini, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres khusus Nomor 1 Tahun 2015 untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran negara melalui belanja negara khususnya dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kebijakan ini menjadi instruksi kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa melalui sistem *e-procurement* dan *e-purchasing* yang berbasis *e-catalogue*.

Mengingat bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai wujud peran alokatif pemerintah dalam konteks *government expenditure* adalah kebijakan yang strategis dalam menentukan arah pembangunan negara, maka kajian terkait hubungan dinamis di antara kedua variabel tersebut, secara khusus penting untuk dilakukan. Harapannya adalah bahwa hasil kajian nantinya dapat menjadi masukan dan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan *research gap* di atas, penulis tertarik untuk melakukan

<sup>‡</sup> Manalu (2004), Alfirman dan Sutriyono (2006), dan Kartika Sari (2007)

penelitian terkait analisis hubungan dinamis antara pengeluaran pemerintah yang dialokasikan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah dan perekonomian Indonesia yang diukur melalui pertumbuhan, dimana tujuannya adalah untuk :

- a. menganalisis dampak peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang/jasa terhadap perekonomian Indonesia yang diwakili oleh pertumbuhan ekonomi (PDB);
- b. menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengadaan barang/jasa dalam hubungan timbal balik (*relationship*) di antara keduanya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 2002).

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu  $Y = C + I + G + (X-M)$  yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya (Dumairy, 2006).

Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. (Mangkoesobroto, 2002).

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi (Boediono, 1998) :

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa;
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai;
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. *Transfer payment* bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis *transfer payment* mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Sedangkan dalam tinjauan mikro, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain (Basri, 2005).

Terkait dengan perkembangan pengeluaran pemerintah, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (Mangkoesobroto, 2002):

- a. Perubahan permintaan akan barang publik;
- b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi;
- c. Perubahan kualitas barang publik;
- d. Perubahan harga faktor produksi;

## 2.2. Peranan Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Secara singkat, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat.

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan (Sukirno, 2006).

Teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah adalah Teori Klasik Keynes. Teori ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah) (Sukirno, 2006).

Oleh karena itu, menurut Mangkoesobroto (2002), di negara manapun selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu:

- a. Peranan alokasi. Sumber daya yang dimiliki pada dasarnya dapat digunakan untuk menghasilkan barang swasta (*private goods*) dan barang publik (*public goods*). Barang swasta (*private goods*) adalah barang yang ketersediaannya dapat dipenuhi oleh sistem pasar yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Namun tidak semua kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini dinamakan barang publik (*public goods*) sehingga perlu dialokasikan oleh negara, seperti contohnya prasarana jalan, pertahanan, pembersihan udara dan sebagainya, yang pengadaannya perlu peran negara (pemerintah) di dalamnya;
- b. Peranan distribusi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengubah posisi distribusi pendapatan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem pajak progresif yaitu beban pajak yang lebih besar dikenakan bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, yang disertai dengan subsidi kepada kelompok miskin. Melalui subsidi, pemerintah secara tidak langsung bisa mempengaruhi distribusi pendapatan melalui kebijakan anggaran misalnya dengan memberikan kredit perumahan murah untuk golongan berpendapatan rendah, subsidi pupuk untuk petani;
- c. Peranan stabilitas. Selain peran alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peran utama sebagai stabilator perekonomian. Hal ini dilakukan melalui berbagai regulasi. Pemerintah yang berupaya menjaga terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

## 2.3. Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa pada dasarnya tujuan kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah adalah : (1) mensinergikan kegiatan ekonomi dari pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendorong percepatan tumbuhnya industri/jasa domestik; (2) pemerintah melaksanakan fungsinya sebagai pihak yang mendorong terjadinya pemerataan; (3) mendorong terjadinya *multiplier effect* yang lebih besar dari kegiatan

pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila seluruh industri/jasa domestik dapat dilibatkan secara optimal.

Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.  
Penggunaan produksi dalam negeri bertujuan meningkatkan perekonomian dalam negeri, sehingga kesejahteraan rakyat meningkat yang ditandai dengan peningkatan *Gross National Product* (GNP). Cara yang ditempuh melalui (1) memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri, (2) penggunaan SNI dalam spesifikasi teknis, (3) pembatasan keikutsertaan usaha asing, di atas 20 miliar untuk pengadaan barang, 100 miliar untuk jasa konstruksi, dan 10 miliar untuk jasa konsultasi, dan (4) preferensi harga untuk produksi dalam negeri.
- b. Kebijakan kemandirian industri alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan alat material khusus (almatsus) dalam negeri.  
Kemandirian alutsista dan almatsus bertujuan untuk menghindari ketergantungan pada negara lain mengingat industri tersebut bersifat sangat strategis. Selain itu, produksi dalam negeri telah mampu menghasilkan sendiri produk alutsista dan almatsus dengan melibatkan anak bangsa.
- c. Kebijakan peningkatan peran UMKM dan kelompok masyarakat.  
Salah satu kebijakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat adalah meningkatkan peran UMKM khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Cara yang ditempuh antara lain paket pekerjaan bernilai sampai dengan Rp2,5 miliar untuk usaha kecil dan memperbanyak paket untuk usaha kecil.
- d. Kebijakan perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya.  
Selama ini aspek pemanfaatan sumber daya alam dengan perhatian penuh pada pelestarian lingkungan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Aspek tersebut dicantumkan dengan maksud untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta ikut serta dalam rangka mengurangi pengaruh rumah kaca dan pemanasan global.
- e. Kebijakan peningkatan penggunaan teknologi informasi.  
Penggunaan teknologi informasi yang berkembang semakin cepat dimaksudkan untuk mendukung prinsip pengadaan yaitu meningkatkan transparansi dan efisiensi tanpa campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan.
- f. Kebijakan penyederhanaan proses.  
Selama ini proses pengadaan barang/jasa masih banyak sekadar memenuhi kewajiban administratif tanpa memperdulikan aspek substantifnya, akibatnya timbul biaya ekonomi tinggi dalam proses tersebut. Oleh karena itu kebijakan penyederhanaan proses pengadaan barang/jasa bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi yang tidak perlu dalam rangka penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas pengadaan. Cara yang ditempuh antara lain: (1) kualifikasi penyedia cukup dengan surat pernyataan, dan (2) sertifikat badan usaha tidak diperlukan.
- g. Kebijakan profesionalisme para pihak.  
Pengadaan barang/jasa berperan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan rentan dengan penyimpangan, konsekuensinya pihak-pihak terkait harus memiliki kompetensi dan profesional di bidangnya.

#### **2.4. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian. Adanya pengeluaran pemerintah secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan

berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi BBM misalnya, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun.

Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat *employment* (menuju *full employment*). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran.

Paham Keynesian menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor. Menurut Keynes untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur pada peningkatan pendapatan nasional, diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa:  $Y = C + I + G + X - M$ . Persamaan ini dikenal sebagai persamaan identitas pendapatan nasional, dimana Y adalah pendapatan nasional sekaligus sebagai penawaran agregat, G menyatakan pengeluaran pemerintah, I menyatakan investasi, X-M adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional.

Ekonom lain, Adolf Wagner, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Hasilnya terbukti menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Kecenderungan ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah (*law of ever increasing state activity*) (Mangkoesoebroto, 2002).

Berlawanan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ( $G \rightarrow Y$ ), Wagner menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomilah yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah ( $Y \rightarrow G$ ). Jelasnya, dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} > \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

dimana:

$GpC$  = Pengeluaran pemerintah perkapita;  $YpC$  = Produk atau pendapatan nasional perkapita ; t = Indeks waktu

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain (Mangkoesoebroto, 2002).

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam beberapa penelitian terdahulu, kebijakan belanja atau pengeluaran pemerintah terbukti secara empiris memiliki pengaruh atau dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun daerah. Begitu pula, pertumbuhan ekonomi juga dapat berdampak pada belanja atau pengeluaran pemerintah.

Ramayandi (2003) dengan menggunakan metode ECM dalam kerangka *Vector Autoregression* (VAR), melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif dalam jangka panjang selama periode 1969-1999.

Manalu (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengeluaran rutin berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan metode OLS dalam periode 1984-2003.

Alfirman dan Sutriyono (2006) dengan menggunakan pendekatan *Granger Causality* dalam kerangka *Vector Autoregression* (VAR), menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara total pengeluaran pemerintah dengan PDB. Pengeluaran rutin tidak signifikan mempengaruhi produk domestik bruto karena lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar bersifat kontraktif seperti belanja untuk pembayaran bunga utang. Sementara pengeluaran pembangunan memiliki hubungan kausalitas positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto. Hal ini dapat dijelaskan oleh pengaruh positif pengeluaran sektor pertanian, infrastruktur dan transportasi serta pendidikan terhadap produk domestik bruto dan pengaruh positif perubahan produk domestik bruto terhadap pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dan transportasi.

Dalam kesempatan yang lainnya, Pascual dan Álvarez-García (2006) meneliti pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di negara Eropa mengambil kesimpulan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif atau negatif tergantung dari negara yang menjadi sampel penelitian.

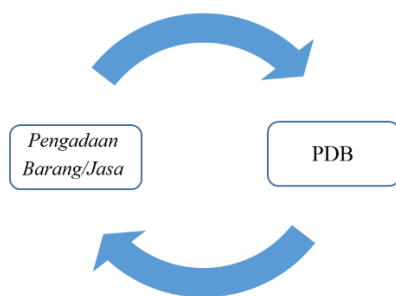
Jiranyakul (2007) dengan menggunakan teknik *Granger* dalam kerangka *Vector Autoregression* (VAR) menemukan bahwa hanya terdapat hubungan satu arah antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Thailand yaitu kenaikan pengeluaran pemerintah yang menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dalam hasil penelitian ini juga disebutkan tidak terdapat hubungan jangka panjang antara kedua variabel. Sedangkan dengan menggunakan metode OLS, menunjukkan bahwa antara kedua variabel berhubungan positif selama periode penelitian.

Kartika Sari (2007) mengkaji tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di kota Medan. Dalam penelitiannya, disimpulkan bahwa perubahan pada pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2008) dengan menggunakan uji kointegrasi Engle-Granger dan uji kausalitas Granger dalam kerangka *Vector Autoregression* (VAR), secara empiris menyatakan bahwa kita tidak bisa menemukan arah hubungan kausalitas, sehingga baik Hukum Wagner maupun hipotesis Keynes tidak valid untuk kasus Indonesia.

Untuk memberikan gambaran dan arah penelitian, maka kerangka berfikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR-3. Kerangka Berfikir



Sumber : Primer

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan model *Vector Autoregressive* (VAR). Model analisis ini digunakan karena mengacu pada beberapa penelitian terdahulu terkait topik penelitian yang menggunakan pendekatan VAR. Selain itu, penulis menganggap bahwa metode VAR ini cocok digunakan dalam model ekonometrika yang tidak banyak bergantung pada pendekatan teori dengan tujuan agar mampu menangkap fenomena ekonomi dengan baik seperti pada penelitian ini. Christopher A. Sims menyatakan bahwa metode VAR merupakan metode pendekatan alternatif terhadap model persamaan ganda dengan pertimbangan meminimalkan pendekatan teori yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena ekonomi dengan baik. Sims memperkenalkan konsep VAR untuk menjawab tantangan kesulitan yang ditemui akibat model struktural yang tidak harus mengacu pada teori melainkan hanya perlu menentukan variabel yang saling berinteraksi dan perlu (Nachrowi, 2006). Oleh karena itu, meskipun teori pendapatan nasional ( $Y = C + I + G + (X-M)$ ) yang berbentuk persamaan identitas menjadi salah satu teori yang mendasari penelitian ini, namun penelitian ini tidak menggunakan persamaan identitas sebagai model.

Model VAR yang digunakan dalam penelitian ini dapat dispesifikasikan dalam persamaan berikut:

$$y_t = c + \sum_{i=1}^p (\phi_i y_{t-i} + \varepsilon_t)$$

di mana :

- $y_t$  ( $y_{t1}, y_{t2}, \dots, y_{tn}$ ) adalah vector  $n \times 1$  dari variabel-variabel endogen
- $y_{t-i}$  adalah variabel *lag* dengan ordo  $i$
- $\phi$  adalah matriks  $n \times n$  koefisien *autoregressive* dari vektor
- $y_{t-i}$  untuk  $i = 1, 2, 3, \dots, p$  dan  $c$  ( $c_1, c_2, \dots, c_n$ ) adalah  $n \times 1$  vektor *intersep* dari model VAR
- $\varepsilon_t$  ( $\varepsilon_{t1}, \varepsilon_{t2}, \dots, \varepsilon_{tn}$ ) adalah  $n \times 1$  vektor dari *disturbance*.

Model VAR dalam penelitian ini memasukkan variable endogen, yaitu nilai realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ)<sup>§</sup> dan angka pertumbuhan ekonomi (PDB) untuk mewakili perekonomian Indonesia.

Model analisis dalam kerangka VAR di atas dilakukan dengan beberapa tahapan pengujian, yaitu:

<sup>§</sup>Nilai realisasi pengadaan barang/jasa yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi belanja Negara dalam bentuk belanja barang dan belanja modal yang direalisasikan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, seleksi umum dan seleksi terbatas berdasarkan Perpres Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan perubahannya.

1. Uji stasioneritas (uji akar unit). Uji ini untuk membuktikan stabilitas (normalitas) pola masing-masing variabel, agar regresi yang dihasilkan tidak lancung (palsu) sehingga tidak menghasilkan interpretasi yang keliru. Penelitian ini menggunakan *Augmented Dickey-Fuller (ADF) test* dengan kriteria pengujian jika nilai absolut statistik *ADF test* lebih besar dari nilai kritis distribusi statistik MacKinnon (*test critical values*), dalam hal ini nilai *Prob.* lebih kecil dari  $\alpha$  atau 0.05, maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa data *time series* yang diamati telah stationer. Dan sebaliknya, jika nilai absolut statistik *ADF test* lebih kecil dari nilai kritis distribusi statistik MacKinnon (*test critical values*), dalam hal ini nilai *Prob.* lebih besar dari  $\alpha$  atau 0.05, maka  $H_0$  diterima, yang berarti data *time series* tidak stationer.

Jika ternyata hasil pengujian menunjukkan seluruh variabel stasioner pada *difference* yang sama (*first difference*) maka untuk menguji apakah model yang akan digunakan adalah VAR atau *Vector Error Correction Model (VECM)*, harus dilakukan uji kointegrasi terlebih dahulu. Jika tidak memiliki hubungan kointegrasi, maka estimasi VAR dapat dilakukan dalam bentuk VAR *indifference*. Namun jika pada data terdapat hubungan kointegrasi maka estimasi yang digunakan adalah VECM. Pendekatan kointegrasi berkaitan erat dengan pengujian terhadap kemungkinan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi seperti yang disyaratkan oleh teori ekonomi. Pendekatan kointegrasi dapat pula dipandang sebagai uji teori dan merupakan bagian yang penting dalam perumusan dan estimasi suatu model dinamis (Gujarati, 2009).

Namun, jika hasil pengujian menunjukkan variabel stasioner pada *difference* yang berbeda, misalnya satu variabel stasioner pada *level* dan yang lainnya stasioner pada *first difference* maka uji kointegrasi tidak perlu dilakukan.

Uji kointegrasi yang akan digunakan (jika harus dilakukan) dalam penelitian ini adalah uji kointegrasi yang dikembangkan oleh Johansen. Uji Johansen menggunakan analisis *trace statistic* dan nilai kritis pada tingkat kepercayaan  $\alpha = 5\%$ . Hipotesis nolnya apabila nilai *trace statistic* lebih besar dari nilai kritis pada tingkat kepercayaan  $\alpha = 5\%$  atau nilai probabilitas (nilai-p) lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  maka terindikasi kointegrasi (Enders, 2004);

2. Uji penentuan panjang *lag* optimal. Uji ini digunakan untuk mengetahui lamanya periode suatu variabel dipengaruhi oleh variabel masa lalunya dan variabel endogen lainnya. Model VAR sangat sensitif terhadap jumlah *lag* data yang digunakan. Apabila *lag* ditentukan terlalu panjang maka *degree of freedom* akan berkurang sehingga menghilangkan informasi yang diperlukan, sedangkan apabila jumlah *lag* ditentukan terlalu pendek maka pemodelan yang dihasilkan bisa keliru (*misspecification model*), yang ditandai dengan tingginya angka standar *error*. Secara umum terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan panjang *lag* yang optimal, antara lain *Likelihood Ratio (LR)*, *Final Prediction Error (FPE)*, *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwarz Information Criterion (SC)* dan *Hannan Quinn (HQ)*. Penentuan panjang *lag* yang optimal didapat dari persamaan VAR dengan nilai AIC, SC atau LR yang terkecil (Enders, 2004).
3. Uji Kausalitas Granger (*Granger's Causality Test*). Uji ini digunakan untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara dua variabel. Kekuatan prediksi (*predictive power*) dari informasi sebelumnya dapat menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara  $y$  dan  $z$  dalam jangka waktu lama. Diharapkan hasil *Granger's Causality* ini dapat memberikan hasil yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas dan arah pengaruh antara belanja pemerintah melalui pengadaan barang/jasa dan perekonomian Indonesia. Kriteria pengujianya, jika nilai *Prob.* lebih kecil dari  $\alpha$  atau 0,05 maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa variabel  $x$  tidak menyebabkan variabel  $y$ . Begitupula sebaliknya, jika nilai

*Prob.* lebih besar dari *alpha* atau 0,05 maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa variabel  $x$  menyebabkan variabel  $y$ .

4. *Innovation Accounting*. Pada dasarnya uji ini digunakan untuk menguji struktur dinamis dari sistem variabel dalam model yang diamati, yang dicerminkan oleh variabel inovasi (*innovation variable*). Dengan kata lain uji ini merupakan ujian terhadap variabel inovasi (*innovation variable*). Uji ini terdiri dari : (i) pengujian *Impulse Response Function* (IRF); dan (ii) *Variance Decomposition* (VD). IRF adalah salah satu metode pada VAR yang digunakan untuk melihat respon variabel endogen terhadap pengaruh inovasi (*shock*) variabel endogen lain yang ada dalam model. Analisis IRF mampu melacak respon dari variabel endogen dalam model VAR akibat adanya suatu *shock* atau perubahan di dalam variabel gangguan ( $\epsilon$ ), yang selanjutnya dapat melihat lamanya pengaruh dari *shock* suatu variabel terhadap variabel lain hingga pengaruhnya hilang dan kembali konvergen. Fungsi *impulse response* didapat melalui model VAR yang diubah menjadi vektor rata-rata bergerak (*vector moving average*) dimana koefisien merupakan respon terhadap adanya inovasi (Enders, 2004).

Sedangkan VD atau dikenal sebagai *Forecast Error Variance Decomposition* merupakan alat analisis pada model VAR yang akan memberikan informasi mengenai proporsi dari pergerakan pengaruh *shock* pada satu variabel terhadap variabel lainnya pada saat ini dan periode ke depannya. VD menggambarkan relatif pentingnya setiap variabel dalam model VAR karena adanya *shock* atau seberapa kuat komposisi dari peranan variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Berbeda dengan IRF, VD berguna untuk memprediksi kontribusi prosentase varian setiap variabel karena adanya perubahan variabel tertentu, sedangkan IRF digunakan untuk melacak dampak *shock* dari satu variabel endogen terhadap variabel lainnya dalam model VAR (Enders, 2004).

### 3.2. Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder bulanan (*time series*) periode 2013–2014, yang meliputi : (i) PDB atas Dasar Harga Konstan 2010 dalam miliar rupiah; dan (ii) nilai realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) dalam miliar rupiah. Data-data tersebut diperoleh dari tabulasi publikasi Badan Pusat Statistik dan Monev LKPP. Untuk data PDB, dilakukan interpolasi untuk memperoleh data bulanan karena data yang tersedia dalam bentuk triwulanan.

## 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data dalam penelitian dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu : (i) hasil pengujian statistik sebelum estimasi (pra-estimasi VAR), yang meliputi uji stasioneritas data dan panjang *lag* optimal dan (ii) uji hubungan timbal balik (kausalitas) antara kedua variabel; (iii) pengujian *Impulse Response Function* (IRF) dan *Variance Decomposition* (VD).

### 4.1. Hasil Uji Stasioneritas

Berdasarkan hasil uji akar unit (*unitroot test*) dengan menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller Test* diperoleh bahwa hanya variabel PBJ yang stasioner atau memiliki *unit root* pada level dan variabel lainnya (PDB) tidak stasioner pada level. Oleh karena itu harus dilakukan pengujian stasioneritas pada *first difference*. Setelah dilakukan pengujian pada *first differences* dengan menggunakan *Augmented Dickey-Fuller Test*, variabel PDB telah stasioner pada tingkat signifikansi 5% (TABEL-1).

#### TABEL-1. Hasil Uji Stasioner

**Augmented Dickey-Fuller test statistic**

|               | <b>Level</b>            |                    |               |
|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|               | <i>critical values</i>  | <i>t-statistic</i> | <i>Prob.*</i> |
| <i>logPBJ</i> | -1.959071               | -2.167683          | 0.0322*       |
| <i>logPDB</i> | -1.959071               | 1.283237           | 0.9436        |
|               | <b>First Difference</b> |                    |               |
|               | <i>critical values</i>  | <i>t-statistic</i> | <i>Prob.*</i> |
| <i>logPBJ</i> | -                       | -                  | -             |
| <i>logPDB</i> | -1.959071               | -2.349056          | 0.0216*       |

Sumber : Hasil pengolahan data ;

\*) data signifikan pada  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan hasil uji stasioner tersebut dapat dikatakan bahwa data telah memenuhi syarat stasioneritas. Oleh karena telah terdapat satu variabel yang telah stasioner pada level dan satu variabel stasioner pada *first difference* atau dengan kata lain bahwa tidak semua variabel stasioner pada *difference*, maka uji kointegrasi tidak perlu dilakukan lagi. Seandainya data variabel stasioner pada *difference* yang sama, maka wajib melakukan uji kointegrasi. Oleh karena itu, model yang telah dispesifikasikan sebelumnya dengan model VAR dapat diestimasi lebih lanjut.

**4.2. Hasil Uji Panjang Lag Optimal**

Penentuan lag dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Likelihood Ratio (LR)*, *Final Prediction Error (FPE)*, *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwarz Information Criterion (SC)* dan *Hannan Quinn (HQ)*. Hasil penentuan panjang lag secara lengkap dapat dilihat pada TABEL-2.

**TABEL-2. Hasil Uji Panjang Lag**

| <b>Lag</b> | <b>LogL</b> | <b>LR</b> | <b>FPE</b> |
|------------|-------------|-----------|------------|
| 0          | -541.1853   | NA        | 1.67e+19   |
| 1          | -477.7024   | 93.50992  | 1.75e+17   |
| 2          | -472.7541   | 11.07467* | 1.33e+17*  |

| <b>Lag</b> | <b>AIC</b> | <b>SC</b> | <b>HQ</b> |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 0          | 49.93473   | 50.03391  | 49.95809  |
| 1          | 45.37679   | 45.67435  | 45.44688  |
| 2          | 45.08897*  | 45.58490* | 45.20580* |

Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan TABEL-2, lag optimal menurut kriteria LR, FPE, AIC, SC dan HQ yang nilainya terkecil dan paling banyak ditunjuk adalah lag 2 sebagaimana ditunjukkan dengan tanda (\*) yang paling banyak. Oleh karena itu, dalam proses selanjutnya untuk mengestimasi model persamaan VAR akan digunakan lag ke-2.

**4.3. Hasil Uji Kausalitas Granger.**

Setelah dilakukan pengujian kausalitas *Granger* terhadap variabel PBJ dan PDB, diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada TABEL-3.

**TABEL-3. Hasil Uji Kausalitas Granger**

| Null Hypothesis:               | Probability |
|--------------------------------|-------------|
| PDB does not Granger Cause PBJ | 0.21310     |
| PBJ does not Granger Cause PDB | 0.05976     |

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari Tabel 2 di atas, dapat dinyatakan bahwa :

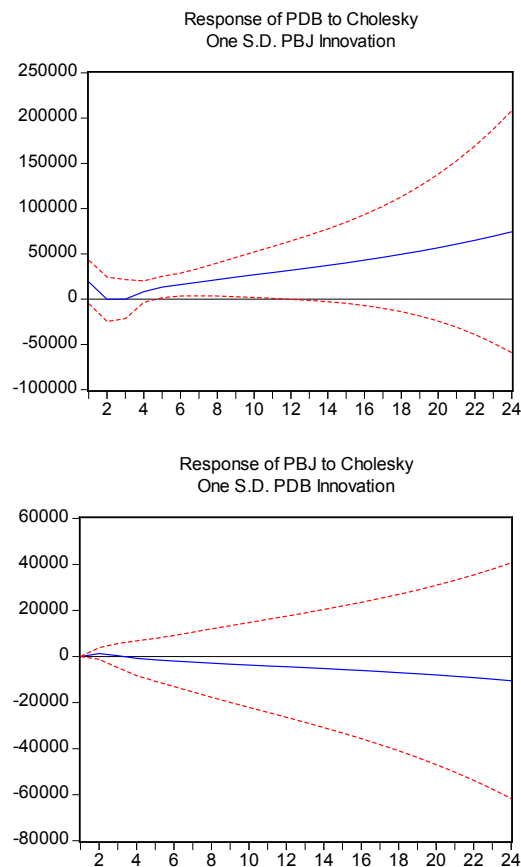
- $H_0$  yang menyatakan bahwa PDB tidak menyebabkan PBJ ditolak, karena nilai  $Prob. > 0,05$ . Artinya bahwa PDB dapat menyebabkan PBJ.
- $H_0$  yang menyatakan bahwa PBJ tidak menyebabkan PDB ditolak, karena nilai  $Prob. > 0,05$ . Artinya bahwa PBJ dapat menyebabkan PDB.

Dua poin di atas menunjukkan bahwa di antara kedua variabel (PBJ dan PDB) terdapat hubungan timbal balik (*relationship*) atau kausalitas. Variabel PBJ dapat digunakan untuk memprediksi nilai PDB. Sebaliknya, variabel PDB juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai PBJ.

#### 4.4. Impulse Response Function (IRF)

Fungsi *Impulse Response* digunakan untuk melihat perilaku suatu variabel dalam merespon suatu kejutan (*shock*). Dalam studi ini, analisis IRF digunakan untuk melihat respon perubahan nilai PDB terhadap *shock* nilai PBJ dan respon perubahan nilai PBJ ketika terjadi *shock* pada PDB.

#### GAMBAR-4. Impulse Response Function (IRF)



Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan (GAMBAR-4), variabel-variabel yang dimasukkan dalam model memperlihatkan respon sebagai berikut :

1. *Shock* satu standar deviasi variabel PBJ langsung membawa dampak positif terhadap nilai PDB pada periode bulan pertama yaitu sebesar 19131.46. Memasuki periode bulan ke-2, *shock* atau perubahan nilai PBJ berpengaruh negatif terhadap nilai PDB. Namun, ini hanya berlangsung selama satu bulan. Memasuki periode bulan ke-3, *shock* tersebut kembali membawa pengaruh positif terhadap nilai PDB. Pengaruh positif ini terus berlangsung hingga akhir periode. Respon positif PDB akibat *shock* perubahan PBJ ini terus berlangsung dalam jangka panjang, namun tidak terlihat menuju keseimbangan atau mendekati nol (*convergence*). Artinya, perubahan nilai PBJ akan terus direspon oleh PDB secara permanen;
2. Pada bulan pertama, *shock* yang terjadi pada PDB belum direspon oleh variabel PBJ. Memasuki periode bulan ke-2, *shock* atau perubahan satu standar deviasi yang terjadi pada PDB langsung direspon positif oleh variabel PBJ dengan nilai 1274.406. Pengaruh positif ini berlangsung hingga periode bulan ke-3 saja. Selanjutnya, memasuki periode bulan ke-4 *shock* atau perubahan yang terjadi pada PDB membawa pengaruh negatif terhadap nilai PBJ. Respon negatif ini terus berlangsung dengan tren yang terus meningkat hingga akhir periode penelitian. Dalam jangka panjang, tren ini juga tidak terlihat menuju keseimbangan atau mendekati nol (*convergence*). Artinya, perubahan nilai PDB akan terus direspon oleh PBJ dengan efek yang permanen.

#### 4.5. Variance Decomposition (VD).

Dekomposisi varian (*variance decomposition*) dalam kerangka model VAR bertujuan untuk memisahkan pengaruh masing-masing variabel inovasi secara individual terhadap respon yang diterima suatu variabel, termasuk inovasi variabel itu sendiri. Dengan kata lain, analisis VD digunakan untuk mengetahui variabel yang paling berperan penting dalam menjelaskan perubahan suatu variabel.

**TABEL-4. Variance Decomposition**

| <b>Variance Decomposition of PDB :</b> |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| Per.                                   | S.E.     | PBJ      | PDB      |
| 1                                      | 5459.042 | 10.99207 | 89.00793 |
| 3                                      | 16912.12 | 10.44786 | 89.55214 |
| 5                                      | 28359.00 | 16.33959 | 83.66041 |
| 7                                      | 40693.19 | 28.08232 | 71.91768 |
| 9                                      | 53834.50 | 42.05036 | 57.94964 |
| 11                                     | 67933.92 | 54.97252 | 45.02748 |
| 13                                     | 83212.20 | 65.48917 | 34.51083 |
| 15                                     | 99936.88 | 73.57504 | 26.42496 |
| 17                                     | 118410.9 | 79.64980 | 20.35020 |
| 19                                     | 138971.3 | 84.18299 | 15.81701 |
| 21                                     | 161992.6 | 87.56698 | 12.43302 |
| 23                                     | 187892.6 | 90.10083 | 9.899171 |
| 24                                     | 202066.1 | 91.12045 | 8.879551 |
| <b>Variance Decomposition of PBJ :</b> |          |          |          |
| Per.                                   | S.E.     | PBJ      | PDB      |
| 1                                      | 5459.042 | 100.0000 | 0.000000 |
| 3                                      | 16912.12 | 99.37824 | 0.621756 |
| 5                                      | 28359.00 | 99.43716 | 0.562837 |
| 7                                      | 40693.19 | 99.14103 | 0.858970 |
| 9                                      | 53834.50 | 98.84844 | 1.151565 |
| 11                                     | 67933.92 | 98.62293 | 1.377069 |
| 13                                     | 83212.20 | 98.45772 | 1.542283 |
| 15                                     | 99936.88 | 98.33779 | 1.662205 |

|    |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|
| 17 | 118410.9 | 98.25057 | 1.749432 |
| 19 | 138971.3 | 98.18675 | 1.813255 |
| 21 | 161992.6 | 98.13973 | 1.860267 |
| 23 | 187892.6 | 98.10488 | 1.895117 |
| 24 | 202066.1 | 98.09095 | 1.909051 |

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari pengujian yang dilakukan, sebagaimana pada TABEL-4 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sumber penting variasi nilai PDB pada bulan pertama adalah *shocks* terhadap variabel itu sendiri sebesar 89,00%. Pada periode bulan ketiga, variasi nilai PDB bersumber dari variabel itu sendiri sisa 83,66% dan selebihnya sebesar 16,33% berasal dari *shocks* nilai PBJ. Memasuki periode bulan-bulan berikutnya, terlihat bahwa variasi nilai PDB didominasi oleh nilai PBJ. Bahkan hingga akhir periode penelitian (bulan ke-24), variasi nilai PDB dibentuk dari PBJ, dengan nilai dekomposisi varian yang relative sangat besar yaitu sebesar 91,12%;
2. Variasi nilai PBJ pada periode bulan pertama seluruhnya bersumber dari variabel itu sendiri yaitu sekitar 100%. Memasuki periode bulan ke-3 hingga bulan-bulan berikutnya, pengaruh variabel PBJ terhadap variasi perubahannya terus menurun dengan nilai relatif tidak besar, hingga akhir periode (bulan ke-24 )sebesar 98,09%. Seiring dengan tren penurunan pengaruh PBJ terhadap variabel itu sendiri, variabel lainnya yaitu nilai PDB justru terlihat meningkat. Peranan nilai PDB dalam membentuk variasi nilai PBJ mulai terlihat ketika memasuki periode bulan ke-3 sebesar 0.62%. Peranan ini terus meningkat hingga akhir periode penelitian, namun dengan tingkat yang relatif kecil, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dekomposisi variannya yang relatif rendah yaitu hanya sebesar 1,90%;

#### 4.6. Pembahasan

Hasil temuan dan analisis statistik yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa *shock* atau perubahan nilai realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia yang diukur dengan indikator pertumbuhan. Analisis ini juga menunjukkan bahwa perubahan kondisi perekonomian Indonesia yang ditandai dengan perubahan indikator pertumbuhannya, sebaliknya juga akan berdampak pada tingkat realisasi belanja atau pengeluaran pemerintah melalui pengadaan barang/jasa. Artinya, tingkat realisasi pengadaan barang/jasa dan kondisi perekonomian Indonesia memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.

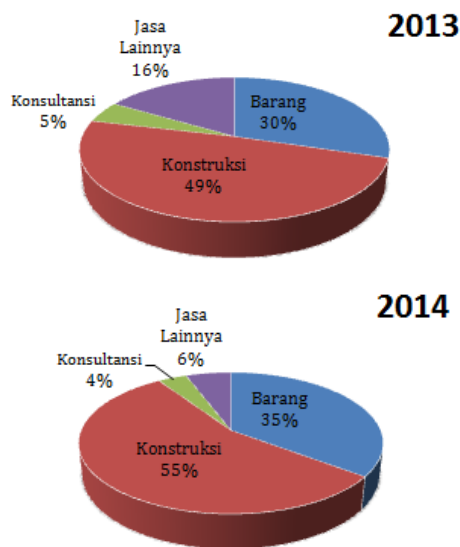
Terjadinya *shock* pada nilai realisasi pengadaan barang/jasa dalam suatu periode waktu tertentu akan direspon positif dan cepat (segera) oleh pertumbuhan ekonomi. Artinya, proses transmisi kenaikan nilai realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada bulan berjalan akan segera terlihat dampaknya dengan naiknya pertumbuhan ekonomi pada bulan tersebut dan proses transmisi ini berlangsung dalam kurun waktu 2 tahun. Bahkan dalam jangka waktu tersebut (2 tahun), proporsi pengadaan barang/jasa dalam membentuk variasi PDB sangat besar sebagaimana yang ditunjukkan oleh dekomposisi variannya yang besar hingga mencapai 91,12%. Hal ini sejalan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa kebijakan yang diambil dan diterapkan pemerintah menyangkut pengeluaran fungsi ekonomi telah mencapai tujuan yaitu sebagai salah satu upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat daya tahan ekonomi.

Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Alfirman dan Sutriyono (2005), Manalu (2004), dan Kartika Sari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara nilai realisasi total pengeluaran pemerintah khususnya di sektor pertanian, infrastruktur dan transportasi dengan PDB. Di sisi lain, temuan ini tidak mendukung

penelitian sebelumnya oleh Ramayandi (2003) yang menyatakan adanya hubungan negatif dalam jangka panjang selama periode 1969-1999. Perbedaan ini mungkin terjadi karena perbedaan jenis *government expenditure* pada penelitian ini yang dikhususkan pada pengadaan barang/jasa yang dominan berupa belanja modal dan infrastruktur.

Relatif cepat dan tetapnya transmisi *shock* pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh ketersediaan berbagai infrastruktur publik yang dihasilkan dari pengadaan barang/jasa. Dalam data realisasi pengadaan barang/jasa tahun 2013 dan 2014, terlihat bahwa komposisi pengadaan barang/jasa pemerintah didominasi oleh pengadaan di bidang konstruksi sebagaimana tampak dalam GAMBAR-5 (Monev LKPP, 2015).

**GAMBAR-5. Komposisi Jenis PengadaanBarang/Jasa Tahun 2013 – 2014**



Sumber : Monev LKPP,2015

Di tengah agenda pembangunan jangka menengah dan tantangan global, pemerintah dalam APBN 2015 menetapkan ruang fiskal yang diperoleh dari restrukturisasi belanja subsidi yang dialihkan antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan, listrik, irigasi dan lainnya, yang menjadi prioritas utama dengan adanya peningkatan anggaran yang signifikan dari Rp190 triliun menjadi Rp290 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian mendapat alokasi anggaran cukup besar sebagai lembaga pemerintah yang melakukan eksekusi penyediaan infrastruktur tersebut. Kebijakan ini searah dengan bukti empiris penelitian ini dan merupakan pilihan tepat, mengingat kondisi infrastruktur yang masih belum memadai.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia, dalam tinjauan kebijakan moneternya di tahun 2015, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2015 diperkirakan masih moderat dan mulai kembali meningkat pada triwulan II 2015. Pengeluaran pemerintah yang diharapkan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih tumbuh terbatas sesuai pola realisasinya di awal tahun dan baru akan meningkat mulai triwulan II 2015 dan seterusnya. Pertumbuhan investasi diperkirakan masih tertahan, meskipun akan meningkat pada triwulan II 2015 dan triwulan-triwulan berikutnya seiring dengan semakin meningkatnya belanja modal pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur. Hal ini sejalan dengan pemantauan kemajuan tahapan konstruksi dari berbagai proyek infrastruktur yang ada. Ke depan, terdapat risiko bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2015 dapat mengarah ke batas bawah kisaran 5,4-5,8%. Pencapaian tingkat pertumbuhan tersebut

akan dipengaruhi seberapa besar dan cepat realisasi berbagai proyek infrastruktur yang direncanakan Pemerintah, selain konsumsi yang tetap kuat dan ekspor yang secara gradual akan membaik.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi juga dapat berdampak pada tingkat realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Artinya, pada tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, peningkatan pertumbuhan ekonomi, justru diikuti dengan penurunan nilai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pembangunan yang semakin meningkat yang di antaranya berasal dari pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi aset seperti infrastruktur, peralatan dan mesin dan lainnya, pada titik tertentu dalam jangka panjang akan berdampak pada berkurangnya pengeluaran pemerintah dalam investasi barang modal. Hal ini karena investasi aset khususnya dalam bentuk infrastruktur (sebagai bagian terbesar dalam komposisi pengadaan barang/jasa pemerintah) memiliki masa manfaat yang relatif panjang, sehingga pengeluaran untuk investasi aset yang baru tidak lagi dilakukan. Pengeluaran hanya dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembelian perlengkapan yang nilainya jauh lebih kecil daripada pengeluaran atau investasi aset di awal. Temuan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Wagner dalam teorinya yang menyatakan bahwa perekonomian dapat mempengaruhi belanja pemerintah. Meskipun dalam kasus Indonesia khususnya dalam belanja untuk pengadaan barang/jasa, perekonomian memberikan pengaruh yang negatif dalam jangka panjang terhadap belanja pengadaan barang/jasa.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. *shock* atau perubahan nilai realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Respon positif perekonomian ini berlangsung cepat dan terus berlangsung dalam jangka panjang secara permanen, di mana 91,12% variasi pembentukan indikator perekonomian Indonesia (pada akhir periode penelitian), berasal dari sektor pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. dalam hubungan timbal balik (*relationship*), perekonomian Indonesia juga memberikan dampak positif terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, dampak positif ini hanya berlangsung sementara. *Shock* atau perubahan yang terjadi pada perekonomian dalam jangka waktu lebih lama akan memberikan dampak negatif terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Respon negatif ini terus berlangsung dengan tren yang terus meningkat dalam jangka panjang secara permanen.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, dapat disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama, untuk dapat meningkatkan kontribusi belanja pemerintah khususnya melalui pengadaan barang/jasa terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu dipastikan semua anggaran belanja pemerintah dapat terserap secara baik. Dengan meningkat tajamnya anggaran pembangunan infrastruktur pada tahun 2015, K/L pusat dan daerah diharapkan dapat menyusun langkah-langkah persiapan yang matang sebagai antisipasi meningkatnya alokasi belanja infrastruktur, dimulai dari kajian *feasibility-study*, mekanisme lelang, *land-clearing*, hingga aspek-aspek teknis lainnya.

Kedua, perlu dilakukan upaya untuk menjamin penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur dilakukan tepat waktu, mengingat hal ini sangat penting sebagai salah satu penentu kinerja ekonomi pemerintah. Hal lain yang masih menjadi sorotan utama publik yaitu terkait proporsionalitas alokasi belanja yang masih didominasi belanja konsumsi dibandingkan

alokasi belanja investasi pembangunan dan infrastruktur dasar. Apalagi oleh banyak lembaga Internasional, minimnya kualitas belanja infrastruktur pemerintah sering dianggap sebagai *barrier* terbesar pembangunan yang belum optimal, salah satunya disebabkan oleh buruknya kinerja birokrasi dalam pengadaan barang/jasa khususnya dalam bidang pengadaan konstruksi infrastruktur.

Ketiga, dukungan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BUMN sebagai *agent of development* dalam rangka percepatan pembangunan bidang infrastruktur dan bidang prioritas pemerintah lainnya. Demikian pula dukungan dan sinergi yang baik terhadap dunia usaha penyedia jasa konstruksi untuk pengadaan infrastruktur harus terus digalakkan, di antaranya melalui konsolidasi, koordinasi dan diskusi yang intens.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hidayat Amir, Ph.D dan Bapak Dr. Agung Budilaksono yang telah mereviu dan memberikan masukan terhadap paper ini dalam Seminar Forum Ilmiah Keuangan Negara (FIKN) 2 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Jakarta.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Alfirman dan Sutriyono. (2006). Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression. *Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1, 2006*.
- Boediono. (1998). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE Yogyakarta
- BPS. (2015). *Publikasi Produk Domestik Bruto*. BPS
- Damodar, N. Gujarati dan Dawn C Porter. (2009). *Basic Econometrics, Fifth Edition*. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Dumairy. (2006). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Enders, Walter. (2004). *Applied Econometric Time Series*. 2nd Edition, New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Hadisaputra, M. Trisno. (2012). Porsi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada APBN. *Jurnal Pengadaan Volume 2 Nomor 2 November 2012: LKPP*.
- Jiranyakul, Komain. 2007. The Relation Between Government Expenditure and Economic Growth in Thailand. *Journal of Economics and Economic Education Research Volume 8 Number 1*
- LKPP. (2015). *Movev Laporan Pengadaan Barang dan Jasa*: LKPP.
- Manalu, Maria Christina. (2004). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. USU Institutional Repository.
- Mangkoesoebroto, Guritno. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nachrowi, Djalal dan Hardius Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
- Pascual, M. & Álvarez-García, S. (2006). *Government Spending and Economic Growth in the European Union Countries: an empirical Approach*. JEL, <http://ssrn.org>.

- Ramayandi, Arief. (2003). *Economic Growth and Government Size in Indonesia: Some Lessons for The Local Authorities Department of Economics*. Working Paper in Economics and Development Studies No. 200302.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.